AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2479

PRESERVASI SEJARAH: EKSPLORASI WARISAN KESULTANAN SERDANG DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Historical Preservation: Exploring the Heritage of the Sultanate of Serdang in Serdang Bedagai Regency

Agung Prayogo[1], Indra Harahap[2], Raihani Dewi Nasution[3], Raden Bagus Astaman[4]
UIN Sumatera Utara Medan
agungprayogohyt@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 25, 2023	Dec 30, 2023	Jan 4, 2024	Jan 7, 2024

Abstract

This paper aims to explore the heritage of the Serdang Sultanate in Serdang Bedagai Regency, there are Serdang Sultanate sites that still exist and are maintained as a preservation effort that is widely recognized and preserved. The type of research used is qualitative with a historical approach, primary data is collected through literature study, observation and documentation of existing historical sites, secondary data completes studies related to themes related to the title through published scientific writing sources; books, theses and journal articles as support for this research. The findings explain the importance of understanding and maintaining the history of the Serdang Sultanate as an integral part of cultural heritage. The construction of a replica of the Darul Arif Palace is concrete evidence of care and determination to maintain authenticity and revive the history of the Serdang Sultanate. The renovation of the Sulaimaniyah Mosque shows a commitment to maintaining the continuity of the main function of the mosque as a center of worship and a silent witness to the development of the Serdang Sultanate. The maintenance of the tombs of sultans reflects a deep appreciation for historical figures.

Keywords: *Preservation; Serdang Sultanate; Serdang Bedagai*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan mengkplorasi warisan kesultan serdang di Kabupaten serdang bedagai, terdapat situs kesultanan serdang yang masih ada dan dipertahankan sebagai upaya preservasi yang dikenalkan dan dilestarikan secara luas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan historis, data primer dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi serta pendokumentasian situs bersejarah yang masih ada, data sekunder melengkapi studi yang berkaitan

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

dengan tema yang terkait dengan judul melalui sumber tulisan ilmiah yang telah dipublikasikan; buku, skripsi, dan artikel jurnal sebagai pendukung penelitian ini. Temuan menjelaskan pentingnya memahami dan merawat sejarah Kesultanan Serdang sebagai bagian integral dari warisan budaya. Pembangunan replika Istana Darul Arif merupakan bukti konkret dari kepedulian dan tekad untuk menjaga keaslian serta menghidupkan kembali sejarah Kesultanan Serdang. Renovasi Masjid Sulaimaniyah menunjukkan komitmen dalam menjaga keberlanjutan fungsi utama masjid sebagai pusat ibadah dan saksi bisu perkembangan Kesultanan Serdang. Pemeliharaan makam para sultan, mencerminkan penghargaan yang mendalam terhadap figur-figur bersejarah.

Kata Kunci: Preservasi; Kesultanan Serdang; Serdang Bedagai

PENDAHULUAN

Kesultanan Serdang, sebagai bagian integral dari Kesultanan Melayu Sumatera Timur yang berasal dari pecahan Kesultanan Deli, memiliki sejarah yang tak terpisahkan dari perjalanan Kesultanan Deli yang lebih besar. Kesultanan Deli sendiri berdiri di bawah kekuasaan Aceh pada tahun 1623 M, diprakarsai oleh seorang tokoh Aceh bernama Muhammad Dalik atau lebih dikenal sebagai Gocah Pahlawan. Setelah mendirikan Kesultanan Deli, Muhammad Dalik memainkan peran penting dalam membentuk fondasi politik dan ekonomi wilayah tersebut. Namun, pada tahun 1653 M, kepemimpinan Kesultanan Deli berubah ketika Muhammad Dalik wafat. Tuan Putranya, Tuanku Panglima Perunggit, mengambil alih tampuk kekuasaan dan pada tahun 1669 M, ia memutuskan untuk memisahkan kerajaan Deli dari kekuasaan Aceh (Auni, 1993).

Langkah ini menjadi tonggak bersejarah, mengukuhkan Kesultanan Deli sebagai entitas yang mandiri. Tuanku Panglima Perunggit berhasil mengumumkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Aceh, membuka lembaran baru dalam sejarah dan membentuk identitas yang khas untuk wilayah tersebut. Kesultanan Serdang, sebagai hasil dari pecahan ini, menjadi pewaris dan pengembang lebih lanjut dari warisan Kesultanan Deli. Penting untuk diingat bahwa sejarah Kesultanan Serdang tidak hanya tentang pemisahan politik dari Aceh, tetapi juga tentang perkembangan budaya, agama, dan sosial di wilayah ini. Dengan demikian, kisah Kesultanan Serdang menjadi bagian tak terpisahkan dari panorama sejarah Kesultanan Melayu Sumatera Timur secara keseluruhan.

Pertentangan kekuasaan yang mencuat pada tahun 1720 menjadi pemicu terpecahnya Kesultanan Deli dan munculnya Kesultanan Serdang. Menurut adat Melayu yang dijunjung tinggi, pewaris Sultan adalah putera permaisuri, dalam hal ini adalah Tuanku Umar Johan. Sayangnya, karena usianya yang masih belia, tampuk kekuasaan Sultan Deli jatuh ke tangan

abangnya, Tuanku Panglima Perunggit. Pertentangan ini memunculkan ketidaksepakatan di kalangan elit Deli, khususnya dari Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembah. Keduanya tidak sependapat dengan penunjukan Tuanku Panglima Perunggit sebagai Sultan, mengingat adat Melayu yang mengedepankan pewaris sah berdasarkan hubungan darah (Azhari & Et.al., 2013).

Keputusan ini memicu perpecahan dan ancaman perang saudara di Kesultanan Deli. Untuk menghindari konflik yang lebih besar, kedua pihak yang berselisih memutuskan untuk membawa Tuanku Umar dan ibunya ke daerah muara Sungai Serdang. Di sana, langkah bijak diambil untuk mencegah pertumpahan darah, yaitu dengan merajakan Tuanku Umar sebagai Sultan Serdang yang pertama pada tahun 1723 M. Meskipun secara resmi bukan di bawah naungan Kesultanan Deli lagi, langkah ini diambil agar konflik internal dapat dihindari. Keputusan tersebut menggarisbawahi kebijaksanaan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas wilayah. Meskipun terjadi pemisahan formal antara Kesultanan Serdang dan Kesultanan Deli, pengakuan atas Sultan Serdang tetap dilakukan untuk menjaga harmoni di antara pihak-pihak yang berselisih. Ini mencerminkan kearifan para pemimpin untuk menjaga keutuhan dan keseimbangan dalam konteks kompleks politik dan budaya Kesultanan Melayu (Azhari & Et.al., 2013).

Istana Kesultanan Serdang berakar dari inisiatif besar Tuanku Umar Johan Pahlawan Alam Shah Kejuruan Junjungan, yang memulai pembangunan Istana Tanjung Puteri. Pada tahun 1750, Tuanku Umar, yang kemudian menjadi Sultan Serdang pertama, mengukir sejarah dengan mendirikan istana megah ini. Terletak di Kampong besar Serdang, Istana Tanjung Puteri menjadi monumen penting yang berdiri kokoh selama masa pemerintahan Tuanku Umar Junjungan, dikenal juga sebagai Sultan Serdang I. Istana Tanjung Puteri tidak sekadar menjadi struktur fisik, melainkan melambangkan keberadaan penting dalam pusat pemerintahan. Keputusan Tuanku Umar untuk mendirikan istana ini sangat strategis karena merangkul peranannya sebagai tempat tinggal resmi Sultan. Istana tersebut bukan hanya sekadar bangunan berindah, melainkan sebuah pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan bagi Kesultanan Serdang (Azhari & Et.al., 2013).

Seiring berjalannya waktu, istana ini menjadi saksi bisu atas berbagai peristiwa penting dalam sejarah Kesultanan Serdang, mengakar kuat dalam kolektif memori masyarakat. Melalui uraian diatas menarik untuk mengekplorasi lebih mendalam, sebab kronologis kehadiran kesultanan serdang di serdang bedagai tepatnya di kecamatan perbaungan menjadi

saksi sejarah yang perlu digali, warisan kesultanan serdang bedagai sampai saat ini masih dipertahankan dan dijaga dengan baik terutama kesultanan serdang bedagai di perbaungan serdang bedagai atas peninggalan-peninggalan warisan sejarah yang patut dijelaskan.

METODE

Dalam eksplorasi warisan Kesultanan Serdang di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, penelitian ini mengadopsi pendekatan historis dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan historis dipilih untuk menggali lebih dalam perkembangan sejarah Kesultanan Serdang. Studi kepustakaan menjadi langkah awal untuk merinci latar belakang historis Kesultanan Serdang. Melalui penelusuran catatan-catatan sejarah dan kajian ilmiah terkait. Data primer dikumpulkan melalui observasi melalui pengamatan mendalam terhadap situs-situs bersejarah, dokumentasi yang ada menjadi sumber data utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti meresapi atmosfer sejarah dan mengumpulkan informasi yang mendukung analsis. Pengumpulan data juga melibatkan studi dokumentasi komprehensif, mengambil data sekunder dari dokumen-dokumen historis, foto, dan sumber-sumber lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kesultanan Serdang

Tengku Luckman Sinar mencatat bahwa Panglima Armada Kesultanan Aceh Darussalam, Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, memegang peran sentral dalam pembentukan embrio Kesultanan Serdang (Sinar, 1986). Sebagai tokoh kunci, Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan telah diakui sebagai pahlawan dan pemimpin yang mendirikan dasar-dasar Kesultanan Serdang. Sejarah mencatat bahwa Kesultanan Serdang bermula dari pemisahan diri Kesultanan Deli di bawah penguasaan Aceh pada tahun 1623 M. Di tengah perjalanan ini, Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, yang menjabat sebagai Panglima Armada Kesultanan Aceh Darussalam, memainkan peran penting dalam menyusun fondasi kesultanan baru. Setelah kewafatan Muhammad Dalik, pendiri Kesultanan Deli pada tahun 1653 M, putranya Tuanku Panglima Perunggit mengambil alih kepemimpinan.

Ketidaksepakatan timbul terkait pewarisan kekuasaan di antara elite Kesultanan Deli. Tuan Putera permaisuri, Tuanku Umar Johan, dianggap sebagai pewaris sah, namun karena usianya yang masih belia, saudaranya Tuanku Panglima Perunggit mengambil alih kendali. Tidak sependapat, Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembah, dua tokoh besar di Kesultanan Deli, memutuskan untuk membawa Tuanku Umar dan ibundanya ke muara Sungai Serdang untuk menghindari konflik lebih lanjut. Langkah bijak diambil dengan merajakan Tuanku Umar sebagai Sultan Serdang yang pertama pada tahun 1723 M (Syauqii et al., 2022).

Kerajaan Aceh Darussalam muncul sebagai entitas politik yang signifikan menjelang keruntuhan Kerajaan Samudera Pasai. Seiring dengan catatan sejarah, pada tahun 1360, Kerajaan Samudera Pasai mulai mengalami kemunduran yang berlanjut hingga akhir abad ke-14 M. Pada titik ini, muncullah Kerajaan Aceh Darussalam, dengan Sultan Ali Mughayat Syah sebagai penguasa pertamanya, yang resmi dinobatkan pada Ahad, 1 Jumadil Awal 913 H (1511 M). Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1524 M, Mughayat Syah berhasil menaklukkan Pasai, mengukuhkan posisinya sebagai satu-satunya kerajaan yang mendominasi kawasan tersebut. Pencapaian ini dapat dianggap sebagai puncak dari kelanjutan perjalanan politik dan kekuasaan dari Samudera Pasai ke Kerajaan Aceh Darussalam (Syauqii et al., 2022).

Keruntuhan Kerajaan Samudera Pasai menjadi pemicu penting bagi kemunculan Aceh Darussalam, menandai transisi kekuasaan di wilayah tersebut. Sultan Ali Mughayat Syah, sebagai tokoh kunci dalam sejarah Aceh, membawa kerajaannya ke puncak kejayaan dengan penaklukan Pasai pada tahun 1524 M. Dengan demikian, Kerajaan Aceh Darussalam dapat dianggap sebagai pewaris sejarah dan pengaruh politik yang telah ditinggalkan oleh Kerajaan Samudera Pasai. Dalam konteks ini, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada abad ke-14 hingga awal abad ke-16 M menjadi latar belakang penting bagi keberdiran dan perkembangan Kerajaan Aceh Darussalam. Pergeseran kekuasaan dari Samudera Pasai ke Aceh Darussalam mencerminkan dinamika politik yang kompleks di kawasan tersebut. Sultan Ali Mughayat Syah, dengan berhasil menaklukkan Pasai, tidak hanya mengukuhkan dominasi Aceh Darussalam, tetapi juga menandai akhir dari era Samudera Pasai yang perlahan-lahan mengalami kemunduran (Haykal, 2022).

Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1590-1636). Pada periode tersebut, Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan yang sangat ramai di wilayah Asia Tenggara.

Kejayaan Aceh tidak hanya mencakup kegiatan ekonomi, tetapi juga menciptakan hubungan diplomatik yang luas, termasuk dengan dinasti Usmani di Turki, Inggris, dan Belanda. Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam memimpin Aceh dalam era di mana kerajaannya mencapai tingkat kemakmuran yang luar biasa. Aceh menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan berbagai jalur perdagangan dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara (Putra, 2023).

Keberhasilan ini tidak hanya menciptakan kekayaan materi, tetapi juga menarik perhatian negara-negara lain yang berusaha menjalin hubungan dengan Aceh. Dalam konteks diplomasi, Aceh pada masa Iskandar Muda menjalin hubungan erat dengan dinasti Usmani di Turki, serta menjalin kontak dengan Inggris dan Belanda. Sebagai bukti kemitraan yang erat, Aceh bahkan mengirim utusan ke Turki Usmani dengan membawa hadiah. Kunjungan ini diterima dengan baik oleh Khalifah Turki Usmani, yang meresponsnya dengan mengirimkan hadiah balasan berupa sebuah meriam dan penasehat militer.

Kolaborasi ini membuktikan tingginya posisi Aceh dalam jaringan hubungan internasional pada saat itu. Kehadiran penasehat militer dari Turki Usmani tidak hanya menandai kerjasama dalam bidang diplomatik, tetapi juga mencerminkan dukungan strategis untuk memperkuat angkatan perang Aceh. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan Aceh tidak hanya bergantung pada kegiatan perdagangan, tetapi juga pada kemampuan diplomasi dan kerjasama militer yang kuat.

Di bawah kepemimpinan Panglima Armada Kesultanan Aceh Darussalam, Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, Kesultanan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda berhasil meraih serangkaian keberhasilan militer dengan menaklukkan beberapa negeri di Pantai Barat dan Timur Sumatera. Pada tahun 1617, Kesultanan Aceh Darussalam berhasil menguasai Johor dan Pahang, disusul dengan penaklukan Kedah pada tahun 1620, serta Nias pada tahun 1624, dan daerah-daerah lainnya. Keberhasilan ini mencerminkan kekuatan militernya di wilayah tersebut .

Salah satu tokoh militer Aceh Darussalam yang memegang peran penting dalam sejarah ini adalah Laksamana Kuda Bintan, atau yang dikenal sebagai Laksamana Malem Dagang. Pemimpin militer ini tak hanya memimpin kampanye militer untuk ekspansi wilayah Kesultanan Aceh Darussalam, tetapi juga memberikan perlawanan yang gigih terhadap bangsa Portugis pada tahun 1629. Pertempuran melawan bangsa Portugis pada tahun 1629 mencatatkan keberanian dan keuletan Laksamana Kuda Bintan serta pasukan Aceh

Darussalam. Perlawanan ini mencerminkan tekad kesultanan untuk mempertahankan kemandirian dan melindungi wilayahnya dari ancaman asing (Subrahmanyam, 1988).

Keberhasilan ini juga menegaskan posisi kesultanan sebagai kekuatan maritim yang signifikan di kawasan. Melalui prestasi militernya, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda mampu mengukuhkan dominasinya di sejumlah wilayah strategis. Penaklukan negeri-negeri di Pantai Barat dan Timur Sumatera, bersama dengan perlawanan terhadap bangsa Portugis, menandai era kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam dalam ekspansi wilayah dan pertahanan terhadap ancaman luar.

Berkat pengabdian dan jasa-jasanya yang luar biasa terhadap Kesultanan Aceh Darussalam, Sultan Iskandar Muda pada tahun 1630 memberikan penghargaan kepada Laksamana Kuda Bintan dengan mengangkatnya sebagai Wali Negeri, menjadikannya wakil Sultan Aceh. Tugas utama Laksamana Kuda Bintan adalah memimpin Sumatera Timur, yang melibatkan wilayah Kerajaan Haru yang berhasil ditaklukkannya. Dengan prestasi ini, Laksamana Kuda Bintan membawa berkah bagi wilayah tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Kesultanan Deli, menjadi bagian integral dari Kesultanan Aceh Darussalam.

Pengangkatan Laksamana Kuda Bintan sebagai Wali Negeri menandai pengakuan tertinggi terhadap kontribusinya dalam mengamankan dan memperluas wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Tugasnya sebagai wakil Sultan Aceh di Sumatera Timur mencerminkan kepercayaan penuh Sultan Iskandar Muda terhadap keahlian dan kepemimpinan Laksamana Kuda Bintan. Wilayah Sumatera Timur, khususnya Kerajaan Haru, menjadi saksi perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Laksamana Kuda Bintan. Kesultanan Deli yang kemudian terbentuk merupakan hasil dari penaklukan dan pengelolaan wilayah tersebut.

Laksamana Kuda Bintan tidak hanya memimpin militer dengan keberhasilan, tetapi juga mengelola wilayah secara efektif sebagai Wali Negeri. Pengangkatan Laksamana Kuda Bintan sebagai wakil Sultan Aceh yang memimpin Sumatera Timur dan pendirian Kesultanan Deli menjadi bukti penghargaan Sultan Iskandar Muda terhadap peran pentingnya dalam menjaga dan memperluas kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Deli, yang bermula dari kepemimpinan Laksamana Kuda Bintan, terus tumbuh dan berkembang, menjadi entitas yang memiliki warisan sejarah dan budaya yang kaya (Abdul Gani Jamora Nasution et al., 2022).

Di bawah kepemimpinan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan, Kesultanan Deli menjalankan upaya aktif untuk mengakhiri sisa-sisa kekuasaan yang masih bertahan dari

Kerajaan Haru, yang pada saat itu diberikan bantuan oleh bangsa Portugis. Selain itu, proses islamisasi terus diupayakan di wilayah-wilayah pedalaman. Kesultanan Deli, yang masih menjadi bagian Kesultanan Aceh Darussalam, mendapatkan dukungan dari kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, memperkuat posisinya dalam dinamika politik dan kebudayaan regional. Pada tahun 1632, tercatat bahwa Kesultanan Deli di bawah Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan menerima dukungan yang signifikan dari Datuk Imam Surbakti, pemimpin Kerajaan Sunggal (Abdul Gani Jamora Nasution et al., 2022).

Kerjasama ini semakin diperkuat oleh pernikahan antara Puteri Nan Baluan Beru Surbakti, adik perempuan Datuk Imam Surbakti, dengan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan. Pernikahan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memperkuat ikatan antara Kesultanan Deli dan Kerajaan Sunggal. Langkah ini memberikan bukti konkret bahwa Kesultanan Deli, meskipun masih berada di bawah naungan Kesultanan Aceh Darussalam, mampu membangun aliansi dan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait di sekitarnya. Upaya untuk menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Kerajaan Haru yang dibantu Portugis menunjukkan keberanian dan determinasi Kesultanan Deli di bawah pimpinan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan. Pernikahan strategis antara Puteri Nan Baluan Beru Surbakti dan Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan tidak hanya memperkuat ikatan antarbangsa, tetapi juga memberikan dampak positif dalam proses islamisasi dan penyebaran pengaruh Kesultanan Deli ke wilayah-wilayah pedalaman.

Setelah meninggalnya Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan pada tahun 1641, tampuk kekuasaan Kesultanan Deli dialihkan kepada putranya, Tuanku Panglima Perunggit (1614-1700) yang bergelar Panglima Deli (Samin, 2015). Pada periode ini, Kesultanan Aceh Darussalam mengalami penurunan kekuatan setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636. Situasi ini dimanfaatkan oleh Tuanku Panglima Perunggit untuk memisahkan diri dari kekuasaan Kesultanan Aceh. Pada tahun 1669, Kesultanan Deli secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya, mengakhiri afiliasi dengan Kesultanan Aceh. Kesultanan Deli di bawah kepemimpinan Tuanku Panglima Perunggit menjadi entitas yang mandiri dan mengelola wilayahnya secara otonom .

Perubahan ini diikuti dengan dukungan dari Belanda, yang pada saat itu telah membangun benteng pertahanan di Malaka. Belanda, dengan kepentingan politik dan ekonomi mereka di wilayah tersebut, melihat deklarasi kemerdekaan Kesultanan Deli sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka di Hindia Belanda. Dukungan dari Belanda

membantu Kesultanan Deli untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi potensi tekanan dari Kesultanan Aceh atau pihak-pihak lain yang mungkin tidak setuju dengan pemisahan tersebut. Dengan deklarasi kemerdekaan pada tahun 1669 dan dukungan dari Belanda, Kesultanan Deli melanjutkan perkembangannya sebagai entitas yang merdeka dan mandiri di tengah perubahan dinamika politik di wilayah itu. Pergeseran ini juga menandai awal hubungan yang erat antara Kesultanan Deli dan Belanda, yang pada akhirnya akan memiliki dampak signifikan dalam sejarah Hindia Belanda (Azhari & Et.al., 2013).

Tuanku Panglima Perunggit memerintah Kesultanan Deli hingga tahun 1700. Setelah kematiannya, kepemimpinan dilanjutkan oleh Tuanku Panglima Paderap, yang memerintah hingga tahun 1720. Namun, pasca wafatnya Sultan Deli kedua ini, terjadi perpecahan di wilayah Kesultanan Deli. Perpecahan ini dipicu oleh pengaruh Kerajaan Siak di Sumatera Timur, serta persaingan untuk merebut kekuasaan di dalam istana Kesultanan Deli di antara anak-anak Tuanku Panglima Paderap.

Pengaruh dari Kerajaan Siak memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas Kesultanan Deli, menyebabkan konflik internal dan persaingan di antara keturunan Tuanku Panglima Paderap. Anak-anak Tuanku Panglima Paderap yang terlibat dalam perebutan kekuasaan di istana Kesultanan Deli meliputi Tuanku Jalaludin Gelar Kejuruan Metar, Tuanku Panglima Pasutan, Kejeruan Santun, dan Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjungan. Perpecahan ini menciptakan ketegangan politik dan sosial di Kesultanan Deli, memperumit dinamika pemerintahan dan kestabilan wilayah. Pengaruh dari luar, terutama dari Kerajaan Siak, menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi internal Kesultanan Deli, yang pada gilirannya memicu persaingan antaranggota keluarga kerajaan untuk merebut kendali penuh (Febriana, 2023).

Puncak perpecahan di Kesultanan Deli mencapai titik kulminan pada tahun 1723. Pada tahun tersebut, Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan saudaranya, Tuanku Panglima Pasutan. Meskipun seharusnya Tuanku Umar Johan Alamshah menjadi pewaris takhta Kesultanan Deli karena statusnya sebagai anak permaisuri, Tuanku Puan Sampali (permaisuri Tuanku Panglima Paderap), namun keadaan berubah dengan kekalahan dalam pertempuran tersebut.

Tuanku Umar Johan Alamshah dan ibunya terpaksa mengungsi ke Kampung Besar, meninggalkan istana Kesultanan Deli. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghindaran dari potensi konflik lebih lanjut dan sebagai upaya untuk menjaga keselamatan diri mereka.

Sebagai hasil dari peristiwa ini, takhta Kesultanan Deli secara otomatis jatuh ke tangan Tuanku Panglima Pasutan. Peristiwa tahun 1723 mencerminkan ketegangan dan perseteruan internal di Kesultanan Deli, yang tidak hanya melibatkan konflik politik tetapi juga melibatkan pertarungan antara anggota keluarga kerajaan. Keputusan Tuanku Umar Johan Alamshah dan ibunya untuk mengungsi menciptakan pergolakan dalam garis suksesi Kesultanan Deli, memicu perubahan kepemimpinan yang akan membentuk arah baru bagi kesultanan tersebut (Azhari & Et.al., 2013).

Meskipun Tuanku Panglima Pasutan telah menempati takhta Kesultanan Deli, tidak semua kaum bangsawan dan raja-raja lokal bersedia mengakui kepemimpinannya sebagai Sultan Deli yang sah. Beberapa di antaranya bahkan menolak pemerintahan Sultan yang baru dan memberikan dukungan mereka kepada Tuanku Umar Johan Alamshah sebagai Sultan yang sah. Dalam catatan sejarah, beberapa raja-raja lokal yang menolak mengakui Sultan Tuanku Panglima Pasutan dan memberikan dukungan kepada Tuanku Umar Johan Alamshah meliputi Raja Urung Sunggal, Raja Urung Senembah, Raja Urung Batak Timur, dan seorang pembesar dari Kejeruan Lumu (Aceh) .(Haris Nasution & Satria, 2017) Keempat tokoh ini akhirnya menobatkan Tuanku Umar Johan Alamshah Gelar Kejeruan Junjongan sebagai kepala pemerintahan baru di Kampung Besar pada tahun 1723.

Keputusan para bangsawan dan raja-raja lokal ini menjadi awal mula berdirinya Kerajaan Serdang sebagai pecahan dari Kesultanan Deli. Pembentukan Kerajaan Serdang mencerminkan perubahan politik dan dinamika kekuasaan di wilayah tersebut, seiring dengan ketidaksetujuan sebagian masyarakat terhadap kepemimpinan Sultan yang diakui secara resmi. Dengan berdirinya Kerajaan Serdang, terbentuklah sebuah entitas politik yang mandiri di bawah kepemimpinan Tuanku Umar Johan Alamshah, mengukuhkan pemisahan dari Kesultanan Deli dan menandai fase baru dalam sejarah politik Kesultanan Melayu di Sumatera Timur.

Replika Istana Darul Arif Kota Galuh Perbaungan Serdang Bedagai

Pada tahun 1898, Sultan Sulaiman melakukan perjalanan ke Jepang, suatu langkah yang signifikan seiring dengan pembangunan Istana Darul Arif Kota Galuh Perbaungan. Perjalanan ini menjadi pencapaian bersejarah, menandai keberangkatannya keluar negeri yang pertama kali. Sultan Sulaiman tidak pernah menginjakkan kaki di negeri Belanda, dan kebenciannya terhadap kolonialisme Belanda menjadi alasan kuat di balik keputusannya.

Keberangkatannya ke Jepang bukan hanya sekadar perjalanan, melainkan sebuah tindakan pembangkangan terhadap permintaan pemerintah Hindia Belanda (Herviyunita, 2021).

Pemerintah Belanda meminta Sultan Sulaiman untuk menghadap Ratu Belanda setelah Tengku Darwisyah ditabalkan sebagai permaisuri Serdang pada tahun yang sama. Sultan Sulaiman menolak permintaan ini dengan tegas, menandakan sikap kerasnya terhadap kebijakan kolonial Belanda. Penting untuk dicatat bahwa perjalanan ke Jepang Sultan Sulaiman tidak semata-mata sebuah tindakan pembangkangan, melainkan juga mencerminkan kebijakan luar negeri yang cerdas. Sultan Sulaiman mengambil langkah ini setelah mendengar bahwa Jepang berhasil mengalami kemajuan yang pesat berkat Restorasi Meiji. Restorasi Meiji di Jepang menjadi peristiwa kunci yang menandai berakhirnya kekuasaan Shogun dan dimulainya kekuasaan Kaisar Jepang.

Jepang, yang sebelumnya terisolasi, mulai membuka diri pada negara asing setelah berlangsungnya Restorasi Meiji. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil menjadi negara maju, kuat, dan berkembang. Perjalanan Sultan Sulaiman ke Jepang juga dapat dipahami sebagai langkah untuk memahami dan meniru model pembangunan yang berhasil. Keinginan Jepang untuk mengikuti jejak negara-negara Eropa yang telah menjadi negara imperialis menjadi salah satu inspirasi bagi Sultan Sulaiman.

Sultan Sulaiman mengunjungi Jepang secara tanpa tanda pengenal atau *incognito,* menandakan bahwa kunjungannya tidak dianggap sebagai pertemuan resmi antara kerajaan, terutama karena Serdang saat itu merupakan jajahan Belanda. Oleh karena itu, tidak ada upacara penyambutan yang lazim terjadi dalam pertemuan antara raja-raja dengan Tenno Heika Meiji. Meskipun tanpa formalitas, pertemuan ini tetap menjadi momen penting yang menciptakan ikatan persahabatan antara Serdang dan Jepang. Sebagai tanda persahabatan, Kaisar Jepang memberikan gambar dirinya dan menandatangani gambar tersebut. Meskipun pertemuan ini tidak resmi, hubungan kerjasama antara Serdang dan Jepang terus berkembang hingga tahun-tahun terakhir Perang Dunia II.

Ketegangan antara Belanda dan Sultan Sulaiman semakin meningkat karena keputusannya mengambil tenaga ahli dari Jepang untuk bekerja di Serdang. Dua ahli Jepang yang datang sekitar tahun 1930, Imada yang merupakan pakar pertanian dan pengairan, serta Ohori, seorang ahli kerajinan tangan dan arsitek yang menata Istana Darul Arif Kota Galuh Perbaungan. Keputusan Sultan Sulaiman ini menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap kolonialisme Belanda dan tekadnya untuk memperoleh dukungan teknis dari Jepang dalam

pembangunan di wilayah Serdang. Tindakan ini juga menjadi bagian dari usaha Sultan Sulaiman untuk memodernisasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya di tengah kendala politik dan ekonomi yang dihadapi di bawah pemerintahan kolonial Belanda (Herviyunita, 2021).

Istana Darul Arif, sebuah monumen megah, mulai dibangun sekitar tahun 1889 di atas tanah seluas 952 hektar di Kotagaluh, Perbaungan, Kampung Melati. Penetapan simpang Tiga Perbaungan sebagai Ibukota baru Serdang dikuatkan dengan pemberian nama "Serdang Bandar Setia" untuk daerah pertemuan tiga jalan dan kampung di sekitarnya. "Serdang Bandar Setia" bukanlah sekadar nama, tetapi juga merupakan lambang kesetiaan pada garis perjuangan para pemimpin Serdang terdahulu. Nama ini mengandung makna mendalam yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Dalam esensinya, Serdang Bandar Setia menjadi simbol penghormatan dan kesetiaan terhadap nilai-nilai perjuangan yang telah ditempuh oleh pemimpin-pemimpin Serdang sebelumnya.

Gambar 1. Istana Darul Arif

Gambar 2. Replika Istana Darul Arif

Istana Darul Arif merupakan sebuah bangunan megah bertingkat lima yang kokoh berdiri di tengah lapangan. Dengan tapak oktagonal, bangunan ini memiliki atap sirap bersusun yang menjulang tinggi seperti menara, memberikan keindahan yang terlihat dari kejauhan. Induk istana ini terbagi menjadi dua bagian utama. Lantai dasar istana menjadi ruang aktifitas Sultan, menyediakan balai tempat kawula dan pembesar menghadap serta ruangan khusus untuk para puteri bermain musik. Pada bagian ini juga terdapat singgasana Sultan dan Permaisuri yang dikenal sebagai Panca Persada, tempat diadakan upacara adat *"Menjunjung Duli"*. Di lantai atas, bagian depan istana menyajikan hall luas yang dikenal sebagai *"Salon"* atau ruang umum di ruang utama bangunan.

Salon menjadi tempat yang bisa dikunjungi oleh tamu kehormatan dari keluarga bangsawan dan pejabat. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat menerima tamu-tamu terkemuka, dengan disediakan pula ruangan makan untuk resepsi. Arsitektur Istana Darul Arif mencerminkan keanggunan dan kekuatan, sementara fungsinya memberikan ruang bagi berbagai kegiatan penting. Dari ruang aktifitas Sultan hingga ruang umum yang indah, istana ini menjadi saksi bisu atas berbagai peristiwa bersejarah dan budaya Kesultanan Serdang. Dengan keunikan arsitektur dan fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya, Istana Darul Arif tidak hanya menjadi tempat bersejarah tetapi juga pusat kegiatan yang berarti bagi masyarakat Kesultanan Serdang seperti perayaan Idul Fitri dan tarian tradisional.

Pada dini hari tanggal 28 Juli 1947, pasukan militer Belanda melaksanakan Agresi Militer-I dengan mendarat secara agresif di kuala sungai Bongan, khususnya di Pantai Cermin. Misi mereka yang jelas adalah merebut Kota Perbaungan dan menguasai jembatan sungai Ular dengan tujuan agar pasukan Indonesia yang mundur dari front Medan Area dapat terperangkap secara efektif. Perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan pelaksanaan kebijakan politik "Bumi Hangus" sebagai respons terhadap invasi Belanda (Khairuddin, 2016).

Kebijakan ini menuntut penghancuran segala yang dianggap berpotensi mendukung penjajah. Istana Darul Arif Kota Galuh, bersama dengan toko-toko dan bangunan permanen lainnya di Kota Perbaungan dan Pantai Cermin, menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tindakan tanpa belas kasihan dari pihak Belanda mengakibatkan pembakaran Istana Darul Arif Kota Galuh dan merusak jejak-jejak bersejarah yang ada di dalamnya. Keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap sikap menolak kerajaan Kesultanan Serdang untuk memberikan dukungan pada masa penjajahan. Pada tahun 2012, Sultan Tuanku Luckman Sinar Basarshah II SH memprakarsai pembangunan replika Istana Darul Arif Kota Galuh sebagai upaya untuk mengenang dan memuliakan kejayaan masa lampau Kesultanan Serdang. Dengan resmi diresmikan pada tanggal 7 Januari 2012, replika ini bukan sekadar rekonstruksi fisik, melainkan simbol perlawanan dan kebangkitan, yang menghidupkan kembali warisan gemilang yang pernah menjadi kebanggaan.

Masjid Sulaimaniyah di Perbaungan dan Pantai Cermin

Masjid Sulaimaniyah, yang terletak di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tepat berada di sisi pinggir jalan Lintas Sumatera Utara. Sedangkan masjid Sulaimaniyah Pantai Cermin berada di pesisir Pantai Kecamatan Pantai Cermin 3 Km

dari Perbaungan. Pada tanggal 29 Juli 1889, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah dari Kesultanan Serdang mengukir sejarah dengan membuka pekan Simpang Tiga Perbaungan (Bandar Setia). Pada saat yang sama, beliau juga mendirikan Istana Darul Arif di Kraton Kota Galuh Perbaungan, menandai kehadiran pusat kekuasaan yang baru. Tidak hanya itu, Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah juga menggerakkan pembangunan Mesjid Raya Sulaimaniyah, sebuah monumen spiritual yang kini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Kesultanan Serdang. Pembangunan Mesjid Raya Sulaimaniyah Perbaungan dan pantai Cermin bersamaan dibangun dimulai pada tahun 1901, menjadi tonggak bersejarah sebagai simbol keberlanjutan nilai-nilai keagamaan di tengah pembentukan struktur politik Kesultanan Serdang.

Gambar 3. Masjid Sulaimaniyah Perbaungan

Gambar 4. Masjid Sulaimaniyah Pantai Cermin

Pada tahun 1939, Sultan Serdang melaksanakan upacara *tauliah* yang bermakna, menguasakan kenaziran Mesjid Raya Sulaimaniyah beserta seluruh wakaf Sultan Serdang kepada Ketua Majelis Syar'i Kesultanan Serdang, yaitu Tengku Yafizham. Tindakan ini menandai suatu peristiwa penting di mana Sultan Serdang memberikan otoritas pengelolaan atas masjid dan seluruh wakaf yang terkait kepada pihak tertentu untuk menjamin keberlanjutan serta pengelolaan yang baik. Pada tahun 1954, Tengku Yafizham mengangkat Tengku Rajih Anwar sebagai *co-nazir*, atau rekan pengelola bersama.

Hubungan kerja sama ini bertujuan untuk mengelola dan mempertahankan wakaf, termasuk Mesjid Raya Sulaimaniyah, dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga serta pengelola harta wakaf Sultan Serdang. Upacara *tauliah* dan pengangkatan *co-*

nazir menjadi langkah-langkah strategis dalam memastikan bahwa Mesjid Raya Sulaimaniyah tetap dijaga dan dikelola secara optimal.

Upaya Renovasi Masjid

Pada 24 Maret 1964, Tengku Yafizham melakukan upacara *tauliah* yang berarti, menguasakan kenaziran Mesjid Raya Sulaimaniyah beserta seluruh wakaf Sultan Serdang secara bersama-sama kepada Tengku Lukman Sinar S.H., Tengku Abu Nawar Sinar, Tengku Abu Kasim Sinar, dan Tengku Ziwar. Namun, karena Tengku Ziwar meninggal dunia, posisinya digantikan oleh Tengku Syahrial pada tahun 1993. Tindakan ini merupakan langkah strategis untuk melanjutkan pengelolaan dan pemeliharaan wakaf serta menjaga fungsi sosial dan spiritual Mesjid Raya Sulaimaniyah dalam masyarakat Kesultanan Serdang.

Pada renovasi pertama Mesjid Raya Sulaimaniyah, yang berlangsung dari 13 Desember 2004 hingga 12 Juli 2005, dilakukan pembaruan pada kubah mahligai, bagian dalam masjid, dekorasi interior, dan penambahan bilik toilet. Proses renovasi ini berhasil terealisasi berkat kerjasama dan dukungan dari Dewan Nazir Wakaf Sultan Serdang, Ibu Megawati Presiden RI, Tengku Rizal Nurdin Gubernur Sumatera Utara, Dr. Syafii Ahmad MPH Sekjen Depkes RI, serta kontribusi dari pihak-pihak lain yang peduli terhadap masjid dan wakaf Sultan Serdang

Mesjid Raya Sulaimaniyah, saat dilihat secara sekilas, memiliki ciri khas arsitektur Melayu dengan warna kuning pada bangunannya, yang umumnya ditemukan di Kabupaten Sergai. Bangunan ini memiliki atap hijau yang melengkapi estetika Melayu. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, terdapat keunikan seperti kubah mesjid yang berbentuk segi empat panjang, dengan bulan sabit dan bintang di atasnya, berbeda dari umumnya kubah mesjid yang berbentuk bulat.

Dalam struktur bangunan masjid, empat tiang besar yang sekitar dua kali pelukan orang dewasa berfungsi sebagai penyangga bangunan. Di tengahnya terdapat lampu hias mewah. Hiasan kaligrafi ayat-ayat al-Quran tentang sholat menghiasi langit-langit masjid, menciptakan atmosfer keagamaan yang khusyuk. Selain itu juga terdapat kaligarafi khas yang ditulis pada kulit kambing atau sapi yang menambah ciri khas keunikan dalam dekorasi masjid, ukiran ini sebagai bentuk warisan yang dipajang pada dinding masjid yang menambah nuansa sejarah masa silam. Terdapat juga toilet dan tempat wudhu untuk memenuhi

kebutuhan ibadah dan kenyamanan jamaah. Selain itu, teras mesjid didukung oleh tiang-tiang berukuran kecil dan lampu yang indah.

Merawat Makam Para Sultan

Di sebelah kanan mesjid, terdapat makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sultan dan kerabat sultan. Pada batu nisan di makam sultan atau kerabat sultan, umumnya masih menggunakan aksara Arab atau huruf Arab Melayu (Jawi) untuk penulisan nama dan tanggal. Hal ini mencerminkan keberlanjutan tradisi penulisan pada batu nisan, mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya Melayu. Beberapa tokoh yang dimaqamkan di Mesjid Sulaimaniyah antara lain:

1. Sultan Serdang V, yakni Sultan Syariful Alamsyah.
2. Almarhum Ketua Majelis Syar'i Kesultanan Serdang, T. Fachruddin.
3. Pemangku adat Kesultanan Serdang, T. Yafizham, yang juga menjadi penerima kenaziran wakaf dari Sultan Serdang pada tahun 1939.
4. Pemangku adat Kesultanan Serdang, T. Abu Nawar Sinar.
5. Tuanku Lukman Sinar Basarshah II, pemangku adat Kesultanan Serdang.

Gambar 5. Makam Tengku Lukman Sinar dan Kerabat Sultan

Makam ini menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi masyarakat setempat, menciptakan ikatan spiritual dengan tokoh-tokoh yang berjasa dalam sejarah Kesultanan Serdang. Makam tersebut dijaga dan dirawat dengan baik sebagai bentuk warisan yang harus dijaga, sebab unsur tersebut merupakan saksi sejarah yang tidak dapat dipisahkan atas kehadiran kesultanan Serdang di Serdang bedagai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas tulisan ini menyimpulkan peran sentral Kesultanan Serdang melalui pembangunan replika Istana Darul Arif dan renovasi Masjid Sulaimaniyah. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami dan merawat sejarah Kesultanan Serdang sebagai bagian integral dari warisan budaya. Pembangunan replika Istana Darul Arif merupakan bukti konkret dari kepedulian dan tekad untuk menjaga keaslian serta menghidupkan kembali sejarah Kesultanan Serdang. Renovasi Masjid Sulaimaniyah menunjukkan komitmen dalam menjaga keberlanjutan fungsi utama masjid sebagai pusat ibadah dan saksi bisu perkembangan Kesultanan Serdang. Pemeliharaan makam para sultan, mencerminkan penghargaan yang mendalam terhadap figur-figur bersejarah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani Jamora Nasution, F. S. R., Zainuri, H. S., & Siregar, N. A. (2022). Kebijakan Sultan Osman Al Sani Perkasa Alamsyah Tahun 1924-1945. *Ulin Nuha Journal*, *1*(1), 18–27.

Auni, L. (1993). *The Decline Of The Islamic Empire Of Aceh (1641 - 1699)*. Institute Of Islamic Studies Mcgiii University Montreal.

Azhari, P. I., & Et.Al. (2013). *Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam Pada Masa Pemerintahan Sulaiman Shariful Alamsyah* (Abdurrakhman (Ed.)). Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri.

Febriana, R. H. (2023). Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Sebagai Akibat Dari Konflik Agraria Di Sumatera Timur Tahun 1946. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, *10*(1), 14–21.

Haris Nasution, A., & Satria, B. (2017). Labuhan Deli Sebagai Pusat Pemerintahan Kesultanan Deli Abad Xviii. *Historis | Fkip Ummat*, *2*(2), 7. Https://Doi.Org/10.31764/Historis.V2i2.187

Haykal, M. (2022). The Ottoman Turkish Expedition And The Anti-Colonialism Movement Of The Sultanate Of Aceh Darussalam 1530-1568. *El Tarikh : Journal Of History, Culture And Islamic Civilization*, *3*(2), 39–54. Https://Doi.Org/10.24042/Jhcc.V3i2.14563

Herviyunita, F. (2021). *Sejarah Istana Kesultanan Serdang*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Khairuddin. (2016). *Peran Kesultanan Serdang Dalam Pengembangan Islam Di Serdang Bedagai*. Uin Sumatera Utara.

Putra, J. S. (2023). Kontribusi Kesultanan Aceh Darussalam Terhadap Kemajuan Kemaritiman Dan Perdagangan Di Nusantara Abad Xvi-Xvii M. *Thaqafiyyat : Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, *21*(1), 48. Https://Doi.Org/10.14421/Thaq.2022.21104

Samin, S. M. (2015). Kerajaan Dan Kesultanan Dunia Melayu: Kasus Sumatra Dan

Semenanjung Malaysia. *Criksetra, Jurnal*, *4*(7), 69.

Sinar, T. L. (1986). *Sari Sejarah Serdang 2*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Subrahmanyam, S. (1988). Commerce And Conflict: Two Views Of Portuguese Melaka In The 1620s. *Journal Of Southeast Asian Studies*, *19*(1), 62–79. Https://Doi.Org/10.1017/S0022463400000333

Syauqii, F., Yasmin, N., & Naldo, J. (2022). Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli Dan Serdang Di Sumatera Timur, 1800-1865. *Warisan: Journal Of History And Cultural Heritage*, *2*(3), 90–96. Https://Doi.Org/10.34007/Warisan.V2i3.1042